

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sari (2012) menyatakan bahwa unsur struktur pengendalian internal yang telah diterapkan dengan baik, sistem pemberian kredit mikro yang dilakukan dengan jelas dalam pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian telah dilakukan dengan baik karena dalam penerapan sistem pemberian kredit di Bank Rakyat Indonesia telah sesuai dengan pedoman atau peraturan Undang-undang Perbankan No 10. tahun 1998 dalam pasal 8 tentang pemberian kredit.

Wahyuni dan Werastuty (2013) menyatakan bahwa prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah yang digunakan telah memadai, demikian pula dengan analisis permohonan pembiayaan yang cukup selektif dilakukan dalam upaya menghindari adanya kredit bermasalah. Prosedur penagihan yang digunakan cukup baik karena terlebih dahulu dilakukan pendekatan-pendekatan kepada nasabah. Penyelesaian kredit bermasalah pada PT.

Anasthasia dkk (2015) menyatakan bahwa hasil analisis terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Banyuasri menunjukkan bahwa sistem pengendalian internnya cukup baik, karena semua sudah dilakukan analisis serta evaluasi kredit oleh petugas mantri sebelum memberikan kredit pada calon

nasabahnya. Sudah ada pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam struktur organisasinya, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, serta praktik yang sehat dalam melaksanakan fungsi tiap unit organisasi.

Prasadhana (2017) hasil analisis terdapat syarat, prosedur dan proses pemberian kredit mikro kecil menengah pada PT. BRI (Persero), Tbk Unit Banyuwangi menunjukkan bahwa sistem pengajuan kredit sudah baik, hal ini terlihat dari tahap pengajuan kredit, analisis kredit sampai keputusan kredit berjalan secara terstruktur sehingga proses pada sistem pengajuan kredit berjalan dengan efektif dan efisien, dengan berdasarkan prinsip kehati-hatian.

Disimpulkan dari sistem pengendalian internal yang diterapkan dalam proses pembiayaan yang sudah memenuhi unsur-unsur pengendalian internal, fungsi, dan struktur organisasi yang baik berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk menunjang efektif dan efisien perusahaan.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Sistem Pengendalian Internal**

#### **a. Pengertian Sistem Pengendalian Internal**

IAI (2001) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut:

Keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Struktur pengendalian intern merupakan istilah yang telah umum dan banyak digunakan dalam berbagai kepentingan. Istilah pengendalian intern diambil dari terjemahan istilah “*Internal Control*”. Sebagaimana diketahui bahwa definisi pengendalian intern yang dikemukakan oleh *Committee of Sponsoring Organizations of the American Institute of Certified Public Accountants* (COSO) yang dikutip oleh Akmal (2007) “Pengendalian intern adalah proses yang dilakukan oleh manusia (dewan direksi, manajemen dan pegawai) yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang masuk akal atau memadai untuk mencapai tujuan-tujuan keandalan informasi, ketaatan pada peraturan yang berlaku serta efisiensi dan efektivitas operasi”.

#### **b. Prinsip-prinsip Pengendalian Internal**

Menurut Romney dan Steinbart (2014), prinsip-prinsip pengendalian internal sebagai berikut :

1. Perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi para pemiliknya.
2. Manajemen harus memutuskan seberapa banyak ketidakpastian akan ia terima saat menciptakan nilai.
3. Ketidakpastian menghasilkan resiko, yang merupakan kemungkinan bahwa sesuatu secara negatif mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai.
4. Ketidakpastian menghasilkan peluang yang merupakan kemungkinan bahwa sesuatu secara positif mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan atau mempertahankan nilai.

5. Kerangka ERM dapat mengelola ketidakpastian serta menciptakan dan mempertahankan nilai.

### c. Komponen Pengendalian Internal

Komponen pengendalian internal menurut COSO (*Committee of Sponsoing Organization*) Romney dan Steinbart (2014) yaitu :

#### 1. Lingkungan Internal (*Internal environment*)

Lingkungan internal atau budaya perusahaan, mempengaruhi cara organisasi menetapkan strategi dan tujuan. Membuat struktur aktivitas bisnis dan mengidentifikasi, menilai serta merespon resiko. Ini merupakan fondasi dari seluruh komponen *enterprise risk management* (ERM).

Lingkungan internal yang lemah atau tidak efisien seringkali menghasilkan kerusakan di dalam manajemen dan pengendalian resiko. Hal tersebut secara esensial merupakan hal yang sama dengan lingkungan pengendalian pada *internal control* (CI). Sebuah lingkungan internal mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Filosofi manajemen, gaya pengoperasian dan selera resiko.
- b. Komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etis dan kompetensi.
- c. Pengawasan pengendalian internal oleh dewan direksi.
- d. Struktur organisasi.
- e. Metode penetapan wewenang dan tanggung jawab.

f. Standar-standar daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten.

g. Pengaruh eksternal.

## 2. Penetapan Tujuan

Penetapan tujuan merupakan komponen ERM yang kedua. Manajemen menentukan hal yang ingin dicapai oleh perusahaan, sering disebut sebagai visi atau misi perusahaan. Manajemen menetapkan tujuan pada tingkatan perusahaan dan kemudian membaginya kedalam tujuan yang lebih spesifik untuk sub unit perusahaan.

## 3. Identifikasi Tujuan

*Comittee of Sponsoring Organization* (COSO) mendefenisikan kejadian sebagai sebuah insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan. Kejadian mungkin memiliki dampak positif atau negatif atau keduanya.

## 4. Penilaian resiko dan Respon resiko

Selama proses penetapan tujuan, manajemen harus memperinci tujuan-tujuan mereka dengan cukup jelas agar resiko dapat diidentifikasi dan dinilai. Manajemen harus mengidentifikasi dan menganalisis resiko untuk menentukan cara resiko-resiko seharusnya dikelola. Manajemen juga harus mengidentifikasi dan menilai perubahan-perubahan yang dapat secara signifikan berdampak pada sistem pengendalian internal.

## 5. Aktivitas pengendalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur membantu meyakinkan manajemen bahwa arahnya telah dijalankan. Aktivitas pengendalian membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil dalam menghadapi resiko sehingga tujuan entitas dapat tercapai. Aktivitas pengendalian terjadi pada seluruh organisasi pada seluruh level dan seluruh fungsi.

6. Informasi dan komunikasi (*information and communication*)

Sistem informasi dan komunikasi haruslah memperoleh dan menukarkan informasi yang dibutuhkan untuk mengatur, mengelola, dan mengendalikan operasi perusahaan. Tujuan utama dari sistem informasi akuntansi yaitu untuk mengumpulkan, mencatat, memproses, menyimpan, meringkas dan mengkomunikasikan informasi mengenai sebuah organisasi.

7. Pemantauan (*monitoring*)

Pemantauan terhadap sistem pengendalian internal akan menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian. Pengendalian internal dapat dimonitor dengan baik dengan penilaian khusus atau sejalan dengan usaha manajemen.

**d. Elemen – Elemen Pengendalian Internal**

Menurut Willson dan Campbell dalam bukunya *Controllershship* (1986) terdapat tujuh elemen pokok yang diperlukan dalam pengendalian internal, yaitu:

- a. Personalia yang kompeten dan dapat dipercaya disertai adanya garis kewenangan dan tanggung jawab yang ditetapkan dengan jelas.
- b. Pemisahan tugas yang memadai, dimana terdapat beberapa batasan-batasan sebagai berikut:
  - Pemisahan tanggung jawab operasional dari pembukuan keuangan.
  - Pemisahan fungsi penjagaan harta dari catatan – catatan akuntansi.
  - Pemisahan fungsi pemberian otorisasi untuk transaksi – transaksi dari fungsi penjagaan atau pemeliharaan harta apapun yang ada hubungannya.
  - Pemisahan tugas – tugas di dalam fungsi akuntansi.
- c. Prosedur – prosedur yang wajar untuk pemberian otorisasi terhadap transaksi – transaksi.
- d. Adanya catatan dan dokumen yang memadai.
- e. Adanya pengawasan secara fisik yang wajar baik terhadap harta maupun catatan .
- f. Prosedur – prosedur yang wajar untuk pembukuan yang memadai.
- g. Adanya suatu sistem untuk verifikasi yang independen.

#### **e. Tujuan Pengendalian Intern**

Menurut Romney dan Steinbart (2014), tujuan-tujuan pengendalian internal berikut telah dicapai :

1. Mengamankan aset-mencegah atau mendeteksi perolehan, penggunaan atau penempatan yang tidak sah.
2. Mengelola catatan dengan detail yang baik untuk melaporkan aset perusahaan secara akurat dan wajar.
3. Memberikan informasi yang akurat dan *reliable*.
4. Menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
5. Mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional.
6. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditentukan.
7. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

Menurut Hery (2013), tujuan pengendalian intern tidak lain yaitu untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa :

- a. Aset yang dimiliki oleh perusahaan telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan perusahaan semata, bukan untuk kepentingan individu (perorangan) oknum karyawan tertentu. Dengan demikian, pengendalian intern diterapkan agar supaya seluruh aset perusahaan dapat terlindungi dengan baik dari tindakan penyelewengan, pencurian, dan penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan wewenangnya dan kepentingan perusahaan.
- b. Informasi akuntansi perusahaan tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko baik



atas salah saji laporan keuangan yang disengaja (kecurangan) maupun yang tidak disengaja (kelalaian).

c. Karyawan telah mentaati hukum dan peraturan.

#### **f. Prosedur Pengendalian Internal**

Menurut Romney dan Steinbart (2014), prosedur pengendalian dilakukan dalam kategori-kategori berikut:

1. Otoritas transaksi dan aktivitas yang layak.
2. Pemisahan tugas.
3. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi (perolehan).
4. Mengubah pengendalian manajemen.
5. Mendesain dan menggunakan dokumen serta catatan.
6. Pengamanan aset, catatan dan data.
7. Pengecekan kinerja yang independen.

Menurut Jusuf (2003), prosedur pengendalian intern yang baik terdiri dari beberapa hal sebagai berikut :

##### **a. Pengawasan tugas yang cukup memadai meliputi :**

- 1) Pemisahan pemegang aktivas dari akuntansi
- 2) Pemisahan otoritas transaksi pemegang aktivas yang bersangkutan
- 3) Pemisahan tanggung jawab operasi dan tanggung jawab pembukuan
- 4) Pemisahan tugas dalam pemrosesan dan elektronik

##### **b. Otoritas yang pantas atas transaksi dan aktivitas**

- c. Dokumen dan catatan yang memadai
- d. Pengendalian fisik atas aktivas dan pencatatan
- e. Pengecekan independen atas pelaksanaan

**g. Keterbatasan Pengendalian Internal**

Keterbatasan sistem pengendalian intern menurut Theodorus M. Tuanakotta (1982) adalah sebagai berikut :

a. Persekongkolan (*Collution*)

Sistem yang bagaimana baiknya akan hancur oleh persekongkolan. Walaupun adanya pemisahan tugas seperti tercermin dalam rencana dan prosedur perusahaan merupakan tulisan diatas kertas belaka. Pengendalian intern mengusahakan agar persekongkolan dapat dihindari sejauh mungkin, akan tetapi pengendalian intern tidak dapat menjamin bahwa persekongkolan tidak terjadi.

b. Biaya (*Cost*)

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau ada kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Tujuan pengendalian intern bukanlah untuk sekedar pengendalian, tetapi berguna untuk berlangsungnya usaha tugas yang efisien dan mencegah tindakan yang dapat merugikan perusahaan, pengendalian juga harus mengendalikan hal tertentu mungkin melebihi kegunaannya.

c. Kelemahan manusia (*Human Weakness*)

Banyak kehancuran yang terjadi pada sistem pengendalian intern yang secara teoritis sudah baik. Karena pelaksanaannya yaitu manusia yang mempunyai kelemahan misalnya orang-orang yang harus memeriksa apakah prosedur-prosedur tertentu sudah atau belum dilaksanakan, sering-sering membubuhkan tanda tangannya secara rutin dan otomatis, tanpa benar-benar melakukan penegasan. Kejadian-kejadian semacam ini cukup bagi orang yang membuat kecurangan dan untuk meneruskan kecurangan tersebut tanpa diketahui.

## 2. Pembiayaan Syariah

### a. Pengertian Pembiayaan Syariah

Menurut Aisyah (2015), pengertian pembiayaan atau *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12).

### b. Pembiayaan Mikro

Adapun yang dimaksud dengan usaha mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tanggal 29 Januari 2003 sebagai berikut:

- a. Usaha produktif milik keluarga atau perorangan.
- b. Penjualan maksimal Rp. 100 juta per tahun
- c. Kredit yang diajukan maksimal Rp. 50 juta

Pembiayaan mikro merupakan suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata. Adapun pembiayaan mikro sebagai berikut:

- 1) Upaya memaksimalkan laba yaitu setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi dalam menghasilkan laba usaha.
- 2) Upaya meminimalkan resiko yaitu usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- 3) Penyaluran kelebihan dana yaitu dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

### **c. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan pada Bank Syariah Sebagai berikut:

#### **1. Pemilik**

Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank

#### **2. Pegawai**

Para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.

#### **3. Masyarakat**

##### **a. Pemilik dana**

masyarakat pemilik dana mengharapkan dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

##### **b. Debitur yang bersangkutan**

Dengan adanya pembiayaan, para debitur terbantu menjalankan usahanya di sektor produktif atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya.

##### **c. Masyarakat konsumen**

Masyarakat konsumen memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

#### **4. Pemerintah**

Dengan penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, di samping itu akan

memperoleh pajak merupakan penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan.

#### 5. Bank

Dari penyaluran pembiayaan, bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan yakni :

1. *Profitability* merupakan tujuan memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang didapat dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. *Safety* merupakan keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

#### **d. Unsur-Unsur Pembiayaan**

Unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan adalah sebagai berikut:

##### a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

##### b. Mitra Usaha

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah

c. Kepercayaan ( *Trust* )

Kepercayaan (*Trust*) bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah atau mitra.

e. Resiko

Resiko merupakan setiap dana yang disalurkan atau diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung resiko tidak kembalinya dana. Resiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Jangka waktu merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran hingga kembali antara 1 tahun hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas jasa

Balas jasa merupakan atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

**e. Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

2. Meningkatkan daya guna barang

- Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat.



- Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.

### 3. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

### 4. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas diarahkan pada usaha-usaha :

- Pengendalian inflasi
- Peningkatan ekspor
- Rehabilitasi prasarana
- Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.

### 6. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya.

## f. Prinsip-prinsip Pembiayaan

Prinsip –prinsip pembiayaan bank Syariah sebagai berikut:

### a. *Character*

*Character* merupakan sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Yang perlu ditekan pada nasabah di bank syariah yaitu

bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seorang nasabah. Kegunaan penilaian karakter yaitu untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willines to pay*) sesuai perjanjian yang telah ditetapkan.

b. *Capacity*

*Capacity* merupakan kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman atau pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon nasabah mampu melunasi hutang-hutangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.

c. *Capital*

*Capital* merupakan besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debiturnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan jika debiturnya merupakan perorangan. Kemampuan *capital* pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial*, yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan bisa juga berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya *capital* bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen *owner equity*, laba ditahan dan lain-lain. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi hutang-hutangnya.

d. *Collateral*

*Collateral* merupakan jaminan yang telah dimiliki yang diberikan kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, dan rekomendasi.

e. *Condition of economy*

*Condition of economy* merupakan keadaan meliputi pemerintah, politik, segi budaya yang mempengaruhi perekonomian.

Penilaian terhadap kondisi ekonomi dapat dilihat dari:

- Keadaan konjungtur
- Peraturan-peraturan pemerintah
- Situasi, politik dan perekonomian dunia
- Keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran

f. *Constrain*

*Constrain* merupakan hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.

Prinsip analisis pembiayaan yang lain dengan 4P sebagai berikut:

1. *Personality* (kepribadian) debitur merupakan segi subjektif namun penting dalam penentuan pemberian kredit.
2. *Purpose* (tujuan) yaitu menyangkut tujuan penggunaan kredit konsumtif, produktif atau spekulatif.

3. *Prospect* (masa depan) yaitu kegiatan pembiayaan kredit. Unsur penilaian meliputi bidang usaha, pengelola bidang usaha, kebijakan pemerintah dan lain-lain.
4. *Payment* (pembayaran) yaitu menjadi perhatian misalnya mengenai kelancaran aliran dana (*cash flow*). Hal tersebut hemat penulis juga merupakan bagian dari prinsip atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah pembiayaan, mitra bank syariah.

Prinsip analisis pembiayaan yang lain dengan 3R sebagai berikut:

1. *Return* atau balikan yaitu hasil yang akan dicapai dalam kegiatan pembiayaan.
2. *Repayment* yaitu perhitungan pengembalian dana dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan.
3. *Risk bearing ability* yaitu perhitungan besarnya kemampuan debitur dalam menghadapi resiko yang tidak terduga.

#### **g. Aspek-aspek Pembiayaan**

Aspek-aspek yang perlu dianalisis dalam proses pembiayaan di bank syariah yaitu:

1. Aspek yuridis
2. Aspek pemasaran
3. Aspek manajemen dan organisasi
4. Aspek teknis
5. Aspek keuangan

## 6. Aspek jaminan

Aspek-aspek di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Aspek Yuridis

Di dalam aspek yuridis diberikan batasan untuk memudahkan pelaksanaan analisis yaitu melalui penelitian terhadap legalitas pendirian perusahaan (badan usaha), legalitas usaha, legalitas pengajuan permohonan pembiayaan dan legalitas barang jaminan.

### 2. Aspek Pemasaran

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam aspek pemasaran, antara lain:

- Produk atau jasa yang dipasarkan
- Penentuan volume atau rencana pemasaran produk
- Strategi pemasaran
- Manajemen pemasaran
- Keadaan pemasaran
- Prospek pemasaran
- Target pemasaran
- Pemasaran hasil produksi

### 3. Aspek Manajemen dan Organisasi

Setiap unit usaha memerlukan pimpinan atau manajer yang bertugas mengelola usaha. Pada perusahaan besar, perusahaan dipimpin oleh pimpinan yang disebut direksi.

#### 4. Aspek Teknis

Lingkup aspek teknis dalam analisis pembiayaan yaitu menilai apakah barang yang diproduksi *customer* dapat dibuat dengan kualitas yang baik dan dengan biaya produksi yang rendah, sehingga laku dijual dan menguntungkan.

#### 5. Aspek Keuangan

Evaluasi kondisi keuangan calon debitur dapat dilakukan dengan melihat laporan keuangan berupa neraca dan rugi-laba perusahaan, analisis rasio keuangan, dan proyeksi arus kas calon debitur bank. Sebagai pihak pemberi pembiayaan, titik berat analisisnya yaitu kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pokok pinjaman sekaligus bunganya secara teratur dan tepat pada waktunya.

#### 6. Aspek Jaminan

Aspek jaminan dalam KUH perdata merupakan sebagian dari prinsip hukum jaminan dalam rangka utang piutang di masyarakat.

#### h. Prosedur Analisis Pembiayaan

Prosedur analisis pembiayaan :

1. Berkas dan pencatatan
2. Data pokok dan analisis pendahuluan
  - a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
  - b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan
  - c. Jaminan
  - d. Laporan keuangan

- e. Data kualitatif dari calon debitur
3. Penelitian data
  4. Penelitian atas relisasi usaha
  5. Penelitian atas rencana usaha
  6. Penelitian dan penilaian barang jaminan
  7. Laporan keuangan dan penelitiannya.

